

MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL DALAM MASYARAKAT NELAYAN
(Studi Kasus Pertentangan dan Pertikaian Nelayan Tradisional di Kelurahan Pasar
Bengkulu dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu).
Social Conflict Management in Fishermen Community
(A Case Study upon Conflict and Dispute between Traditional Fishermen from Kelurahan
Pasar Bengkulu and Modern Fishermen from Kelurahan Kandang in Bengkulu City).

ANTONY WIJAYA

Mahasiswa Program Magister IAP, PPSUB

Siti Rochmah dan Ismani, HP

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FIA UB

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu serta bagaimana konflik kedua kelompok nelayan tersebut diselesaikan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi Bengkulu.

Penelitian dilakukan di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Pasar Bengkulu yang merupakan kelurahan terbanyak masyarakat nelayan tradisionalnya dan Kelurahan Kandang yang merupakan kelurahan terbanyak kelompok nelayan modernnya, dan konflik yang terjadi sejak tahun 1985 hingga tahun 1999 selalu melibatkan masyarakat nelayan di kedua kelurahan tersebut. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis data dari Strauss-Corbin melalui 3 tahapan analisis yaitu : Kode Pembuka (Open Coding), Kode Analisis (Axial Coding) dan Pemilihan Kode (Selective Coding).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern disebabkan oleh beberapa faktor : (1) masih beroperasinya alat tangkap trawl (jaring pukat harimau) yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah; (2) pelanggaran jalur penangkapan; (3) perbedaan teknologi penangkapan; (4) kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi pemerintah; dan (5) belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan.

Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu dapat diselesaikan melalui upaya-upaya : (1) Kapal-kapal trawl dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nelayan tradisional (0-3 mil laut), jika memang tetap beroperasi, nelayan tradisional menghendaki adanya kontribusi kepada para nelayan tradisional berupa 5 % dari hasil tangkapan nelayan modern; (2) Penetapan jalur penangkapan yang jelas bagi nelayan tradisional dan bagi nelayan modern, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran jalur penangkapan; (3) Sikap tegas dari Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu terhadap segala macam pelanggaran yang terjadi; (4) Kemitraan usaha antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Propinsi Bengkulu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut adalah melalui upaya-upaya sebagai berikut : (1) Masih bersifat insidental, dimana pemerintah baru turun tangan jika konflik yang terjadi telah berbentuk benturan fisik seperti : penyerangan kapal-kapal di tengah laut, penyerangan rumah nelayan dan sebagainya, sedang upaya pra konflik terjadi dalam rangka mengantisipasinya belum ada yang dilakukan oleh pemerintah; (2) Pasca konflik terjadi, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan para nelayan terutama nelayan modern, melalui tim yang dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Kelautan

Propinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Polresta dan AL agar tidak ada lagi yang mengoperasikan alat tangkap yang telah dilarang penggunaannya; (3) Memanggil para perwakilan nelayan tradisional dan perwakilan nelayan modern untuk berdamai dan bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama ini; (4) Bantuan kapal motor kepada kelompok nelayan tradisional untuk digunakan sebagai tindakan pengawasan terhadap kegiatan nelayan modern dalam melakukan penangkapan ikan.

Kata kunci: Nelayan, konflik sosial

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the causes of conflict between traditional fishermen and modern fishermen in the city of Bengkulu and to figure out how the municipality (pemkot) and province government solve the conflict between the two fishermen communities.

This research was conducted at two districts, Kelurahan Pasar Bengkulu as a district where traditional fishermen is the major population and Kelurahan Kandang which is a district with modern fishermen as its major population. The conflicts between these two districts having occurred since 1985 to 1999 always involve the fishermen settlers from both districts. The research method is taken from the data analyses of Strauss-Corbin, through three stages of analyses: Open Coding, Axial Coding, and Selective Coding.

A results of the research shows that there are some factors that cause conflict between traditional fishermen and modern fishermen, those are: (1) some trawls still in operational though prohibited by the government; (2) violation on fishing route; (3) fishing technology differences; (4) the lack of roles and function of government institution; (5) the lack of law enforcement on fisheries regulation.

Conflicts between traditional and modern fishermen in the city of Bengkulu can be resolved through: (1) prohibition of trawl boats activity in the traditional fishermen waters area (0-3 mile), if there is still trawl boats operational in this area, the traditional fishermen demand 5% of the modern fishermen catch; (2) clear establishment of each fishing route for traditional fishermen and modern fishermen, so there is no more violation of fishing route; (3) firm and just law enforcement from the city and province government of Bengkulu upon any violation; (4) partnership between traditional and modern fishermen.

Government efforts in resolving social conflicts are: (1) incidental action, the government takes an action after a physical clash occurs: attacks on boats at the waters, attacks on the fishermen settlement, and so on, while there is no effort from the government before the conflict occurs as an anticipation action; (2) After the conflict, the government supervises the fishermen activities, mainly the modern fishermen, using a team formed by the Fisheries and Marines Official Service of Bengkulu Province in coordination with the local police and Navy so that there will be no more trawl used; (3) the government gather representatives of traditional and modern fishermen to discuss and formulate resolution for the prolonging conflict; (4) Aid in the form of motor boat for traditional fishermen to be used as a mean of supervision towards modern fishermen's fishing activity.

Keywords: fishermen, social conflicts.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (lebih kurang 17.508 buah pulau besar dan kecil) yang memiliki wilayah laut seluas 5.866 juta km persegi, sedangkan wilayah daratan hanya seluas 2.027 juta km persegi atau sepertiga wilayah laut Indonesia (Jawa Post, 4 Nopember 1999). Dilihat dari data tersebut, seyogyanya potensi kelautan mempunyai kontribusi besar dalam menyokong penghasilan masyarakat pantai. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian. Penghasilan masyarakat maupun negara / daerah sebagian besar berasal dari sektor-sektor non perikanan.

Rendahnya penghasilan nelayan tradisional sebagai salah satu sub sistem masyarakat pedesaan pantai, karena teknologi penangkapan ikan laut pada umumnya masih rendah atau masih menggunakan peralatan tradisional (Soemardjan, 1992). Akibatnya, nelayan tradisional sedikit sekali memiliki penyangga ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Kehidupan mereka dari hari ke hari sangat fluktuatif karena pendapatan dari hasil menangkap ikan selain rata-rata kecil juga bersifat tidak pasti, apalagi pada saat musim badai datang. Kadang-kadang hingga berhari-hari mereka tidak dapat melaut dikarenakan ombak dan angin yang sangat besar dan kencang, sementara dapur mereka menuntut untuk terus mengepul.

Lain halnya dengan kehidupan nelayan modern, dimana mereka rata-rata merupakan keluarga yang kaya, atau bisa dikatakan serba berkecukupan. Mereka mempunyai kapal-kapal motor yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan yang lumayan baik, dimana rata-rata dari mereka menggunakan alat tangkap jaring trawl atau jaring pukat harimau. Dengan menggunakan kapal bermotor yang lumayan besar, nelayan modern dapat menangkap ikan hingga ke tengah laut dan bermalam hingga berhari-hari karena kapal mereka dilengkapi dengan alat pendingin ikan. Dengan peralatan yang cukup eksploitatif, maka hasil yang diperoleh

juga tinggi. Dengan peralatan yang demikian maka hasil yang ditangkap juga menjadi lebih banyak, lebih-lebih jika konsentrasi tangkapan pada jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. (Rokhmin, 2001)

Konflik yang terjadi pada nelayan Bengkulu bukan hanya disebabkan oleh penolakan nelayan tradisional terhadap alat tangkap trawl (pukat harimau), seperti yang pernah terjadi pada nelayan di Muncar Banyuwangi yang diteliti oleh Don Emmerson (1975). Peristiwa di Muncar tersebut disebabkan oleh rasa “ketidakadilan” dari pemerintah terhadap suatu kelompok nelayan, dimana mereka menganggap tidak adanya “rasa kebersamaan” dalam menikmati sumberdaya perikanan. Penelitian yang dilakukan oleh Don Emmerson tersebut ada kaitannya juga dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu adanya “rasa memiliki bersama” dalam kelompok nelayan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan. Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Kota Bengkulu juga dipicu oleh perebutan sumberdaya perikanan, dimana terjadinya pelanggaran jalur penangkapan ikan oleh salah satu kelompok nelayan. Hal tersebut seperti yang telah diteliti oleh Kusnadi (2002) terhadap nelayan di sepanjang Pesisir Utara Jawa Timur, dimana diungkapkan olehnya bahwa sering terjadinya konflik antara nelayan karena adanya perebutan sumberdaya perikanan. Banyak nelayan pendatang yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayahnya sehingga membuat marah para nelayan lokal. Hal tersebut tidak terjadi pada nelayan di Kota Bengkulu karena tidak ada nelayan luar daerah yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu merupakan ibukota Propinsi Bengkulu, yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 82 kelurahan. Terletak di jalur lintas barat pesisir selatan yang berbatasan di bagian utara dengan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dan di bagian Selatan sepanjang pesisir barat pulau Sumatera

berbatasan dengan Kabupaten Liwa Propinsi Lampung. Diantara beberapa kelurahan yang ada di Kota Bengkulu, Kelurahan Pasar Bengkulu merupakan desa nelayan tradisional terbesar, dimana di kelurahan tersebut dulunya merupakan pelabuhan lama bekas peninggalan Penjajahan Inggris, sehingga hampir 90 % penduduknya merupakan nelayan tradisional secara turun temurun. Sedangkan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar, merupakan daerah Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudra satu-satunya yang ada di Propinsi Bengkulu. Kebanyakan nelayan di kelurahan ini merupakan nelayan pendatang yang berasal dari Bugis Makassar dan dari Medan Sumatera Utara tetapi telah hidup bertahun-tahun di Bengkulu. Hampir sebagian besar dari mereka merupakan nelayan modern yang memiliki perahu dengan dilengkapi dengan mesin dan alat tangkap yang lebih maju dan canggih dari nelayan yang ada di Kelurahan Pasar Bengkulu. Sehingga mereka disebut juga sebagai kelompok nelayan modern. Kedua kelompok nelayan di kedua kelurahan tersebut sejak tahun 1990-an telah terlibat konflik yang telah menjurus kepada bentrokan fisik sehingga menimbulkan kreugian kedua belah pihak yang tidak sedikit.

Bertolak dari paparan singkat tentang fenomena kondisi kehidupan masyarakat nelayan di kedua kelurahan tersebut, peneliti berminat untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi konflik dan solusi pemecahan konflik kedua kelompok masyarakat nelayan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang ?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian konflik antara nelayan tradisional dan nelayan modern tersebut ?

3. Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota mengatasi konflik antara kedua kelompok nelayan tersebut ?

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk “mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan” tentang :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang.
2. Bentuk penyelesaian konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.
3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi konflik antara kedua kelompok nelayan tersebut.

KERANGKA KONSEP

Don Emmerson (1975) meneliti tentang Konflik Sosial Nelayan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, dalam makalahnya yang berjudul *Orders of Meaning : Understanding Political Change in A Fishing Community in Indonesia*, mengemukakan bahwa terjadinya konflik nelayan di Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 30 September 1974 dikarenakan tidak adanya dimensi keadilan melalui etika “menikmati bersama” dalam struktur masyarakat peguyuban yang inegalitarian.

Bagong Suryanto (1992) meneliti tentang “Modernisasi perikanan, kemiskinan, dan polarisasi sosial antara nelayan modern dan tradisional” di Kecamatan Palang, kabupaten Tuban, Jawa Timur, ditemukan bahwa nelayan tradisional di Kecamatan Palang tergolong miskin, pendapatannya relatif pas-pasan. Untuk mengatasi kekurangan, strategi yang ditempuh adalah (1) menggadaikan barang atau menjual barang miliknya yang sesungguhnya sudah sangat sedikit; (2) melakukan remanajemen dalam alokasi pengeluarannya atau terpaksa mengurangi

frekuensi dan menu makanan sehari-harinya. Ary Wahyono, dkk (2001) meneliti tentang “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan” di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Cirebon, dikemukakan bahwa upaya melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan harus lebih dulu melakukan identifikasi secara benar karakteristik yang melekat pada masyarakat nelayan, terutama menyangkut pola adaptasi sosial ekonomi, jaringan sosial dan karakteristik lingkungan sumberdaya yang menjadi tumpuan hidup mereka.

Kusnadi (2002), meneliti tentang Konflik Sosial Nelayan di Pantai Pesisir Utara Jawa Timur, mengemukakan bahwa banyak terjadinya konflik dalam masyarakat nelayan khususnya yang terjadi di sepanjang Pantai Pesisir Utara Jawa Timur penyebab utamanya tentang keadaan sumber daya perikanan dan faktor-faktor lain yang telah memicu terjadinya konflik di kalangan masyarakat nelayan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif dengan metode studi kasus, karena peneliti ingin mengumpulkan sejumlah informasi secara mendalam dan mendetail pada kasus konflik/pertikaian antara masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar dan di Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam masyarakat nelayan.

Pengoperasian alat tangkap yang dilarang;
Perebutan sumber daya perikanan;
Pelanggaran jalur penangkapan;

Kondisi ekonomi masyarakat nelayan tradisional, kecemburuan sosial dan kurang jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan serta kurang tegasnya aparat birokrasi pemerintah.

Bentuk penyelesaian konflik sosial.
Secara insidental;

Jangka panjang agar konflik tidak meluas dan berkembang.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi konflik sosial.

- a. Upaya-upaya yang bersifat insidental;
- b. Upaya-upaya yang bersifat preventif;
- c. Upaya-upaya yang bersifat represif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar dan di Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang ditetapkan secara sengaja karena pertimbangan keunikannya sebagai berikut :

Kelurahan Kandang Kecamatan Selebar merupakan daerah/wilayah nelayan modern, dimana hampir 80 % masyarakat nelayannya merupakan nelayan Bugis / Makassar yang menggunakan kapal-kapal motor dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan sebagian besar masih menggunakan trawl atau pukat harimau sebagai alat tangkap ikan walaupun kadang penggunaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu di Kelurahan Kandang terdapat satu-satunya TPI yang ada di Kota Bengkulu, sehingga setiap hari terjadi kegiatan baik penangkapan maupun pelelangan ikan.

Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Teluk Segara merupakan perkampungan nelayan tradisional, dimana hampir 80 % masyarakat nelayannya merupakan nelayan kecil yang pas-pasan hidupnya dan menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil yang disebut sampan selodang tanpa menggunakan mesin.

Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

Informan (orang), sebagai sumber data utama dipilih secara purposive sampling.

Dokumen; sebagai sumber data, sifatnya hanya melengkapi data utama.

Tempat dan Peristiwa; sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Instrumen Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat instrumen utama atau key instrument. Peneliti yang mengadakan observasi atau wawancara tak terstruktur dengan hanya menggunakan buku catatan. Peneliti (manusia) sebagai instrumen yang mampu membaca seluruh gejala alam sebagai obyek penelitian, yang dibantu seperangkat alat berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan sarana audio visual berupa kamera.

Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : persiapan memasuki lokasi penelitian (Getting In); ketika berada di lokasi penelitian (Getting Along); dan Pengumpulan Data (Logging Data).

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu : (1) observasi; (2) wawancara (interview), dan (3) dokumentasi, sehingga dapat diperoleh *thick description*.

Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, penulis mengacu pada pendapat Moleong (1997), yakni harus memenuhi empat kriteria utama, sebagai berikut :

1. Derajat Kepercayaan (credibility)
2. Ketergantungan (dependability)
3. Keteralihan (transferability).
4. Kepastian (confirmability)

Analisis Data

Unit analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kelompok. Sedangkan proses analisis data melalui tahap-tahap

analisis data dari Strauss & Corbin (Basics of Qualitative Research). Alasannya, prosedur analisis data dari Strauss & Corbin dianggap peneliti mampu mengidentifikasi data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, langkah-langkahnya adalah :

Open Coding (Kode Pembuka), meliputi proses pengungkapan, memerinci, memeriksa, memilah-milah, membandingkan, mengkonseptualisasikan dan mengkategorisasikan data.

Axial Coding (Kode Analisis), kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian dianalisis dan diorganisir kembali sesuai dengan label kerangka model paradigma grounded theory.

Selective Coding (Pemilihan Kode)

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan memeriksa kategori inti secara sistematis, kemudian mencari kaitannya dengan kategori yang lain. Kategori inti yang ditemukan melalui perbandingan hubungan antar kategori dengan menggunakan model paradigma, selanjutnya diambil kesimpulan dan akhirnya diangkat menjadi general design (rancangan umum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Kelurahan Pasar Bengkulu

Kelurahan Pasar Bengkulu termasuk wilayah Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu. Kelurahan ini sangat mudah dicapai lewat jalan darat dengan kondisi jalan yang sangat baik. Waktu tempuh dari pusat kota hanya sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan pribadi.

Pasar Bengkulu adalah kelurahan pantai yang terletak di sebelah Utara dan memiliki pantai terpanjang dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan lain dalam Kecamatan Teluk Segara. Sehingga sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan pantai. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Pasar Bengkulu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Beringin Raya; Sebelah Selatan : Kelurahan Kam-pung Bali; Sebelah Barat: Samudra Indo-nesia; Sebelah Timur: Kelurahan Rawa Makmur.

Kelurahan Pasar Bengkulu seluruh wilayahnya merupakan daratan dan tidak merupakan daerah perbukitan atau pegunungan. Tinggi tempat dari permukaan laut 3 m dengan curah hujan rata-rata 3000 mm pertahun dan keadaan suhu rata-rata 37o C.

Jumlah penduduk Kelurahan Pasar Bengkulu 1.548 jiwa dengan 334 KK, terdiri dari 768 laki-laki dan 780 perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 33 jiwa per km. Sebagian besar penduduknya (> 90 %) adalah suku asli Bengkulu. Hanya sebagian kecil (< 10 %) penduduk yang berasal dari suku Jawa, Sunda dan lain-lain yang dikenal sebagai pendatang di wilayah tersebut. Keberadaan suku pendatang berawal dari terbukanya peluang kerja sebagai ABK dan Kapten Kapal pada salah seorang pengusaha yang memiliki > 20 unit kapal motor di kelurahan tersebut.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk masih relatif rendah karena penduduk yang dapat menamatkan SLTA, Akademi dan Perguruan Tinggi baru mencapai 20, 3 %. Bahkan bila dihitung jumlah yang tamat Akademi dan Perguruan Tinggi hanya mencapai 1,9 %. Jumlah buta aksara dan angka mencapai 0,65 %. Menurut data statistik kelurahan, jumlah penduduk usia kerja sebanyak 883 orang dan yang sudah bekerja sebanyak 663 orang.

Karena merupakan kelurahan nelayan tradisional, maka di Kelurahan Pasar Bengkulu terdapat 6 (enam) Kelompok Nelayan Tradisional dimana seluruh nelayan di sana merupakan anggota dari masing-masing kelompok nelayan tersebut. Melalui Kelompok Nelayan tersebut berbagai bantuan dari Pemerintah Kota Bengkulu disalurkan baik berupa bantuan jaring, perahu maupun mesin boat. Kelompok-kelompok nelayan tradisional tersebut antara lain : Mina Berkah, Bukit Segara, Kota Tuo, Sungai Serut. Jaya Katawang dan BK 5. Dari keenam

kelompok nelayan tersebut, Kelompok Nelayan Mina Berkah telah memiliki koperasi nelayan, dimana melalui koperasi tersebut para nelayan yang tergabung sebagai anggotanya dapat meminjam uang dan membeli kebutuhan untuk melaut.

Kondisi Sosial Masyarakat Nelayan Kelurahan Pasar Bengkulu

Nelayan tradisional yang dimaksud dalam tulisan ini adalah nelayan yang menggunakan kapal motor dengan ukuran kurang dari 10 GT serta para buruh nelayan (ABK) dari kapal motor dengan ukuran lebih atau sama dengan 10 GT. Adapun yang dimaksud dengan nelayan tradisional yaitu nelayan yang masih menggunakan perahu layar dengan tenaga dayung atau mereka yang telah menggunakan kapal motor dengan kekuatan mesin dibawah 10 GT dengan menggunakan alat tangkap tradisional seperti : jaring, bubu dan pancing.

Mengamati jenis usaha nelayan yang ada di Kelurahan Pasar Bengkulu bisa dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu :

1. Nelayan Jaring Hijau, yaitu nelayan yang menggunakan kapal motor dengan wilayah penangkapan cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu 5 – 15 hari melaut.
2. Nelayan Jaring Udang, yaitu nelayan yang menggunakan jaring khusus untuk menangkap udang kelong dan udang karo (lobster) yang merupakan komoditi ekspor. Nelayan Jaring Putih, yakni usaha nelayan yang khusus untuk menangkap ikan. Lebih dari 50 % nelayan jaring udang, biasanya menggunakan jaring putih pada saat tidak musim udang.
3. Nelayan Pukat Pinggir/Pukat Pantai, yaitu nelayan tradisional yang merupakan ciri khas usaha nelayan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nelayan pukat jumlahnya semakin berkurang dan merupakan tradisi yang harus dilestarikan. Jenis usaha ini memerlukan banyak tenaga kerja untuk menarik pukat yaitu 15 – 20 orang.

Kelurahan Kandang

Kelurahan Kandang terletak di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Kelurahan ini merupakan kelurahan yang paling luas di Kota Bengkulu dengan luas mencapai 3.157, 48 Ha dan juga merupakan kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk yang terbesar di Kota Bengkulu, yaitu mencapai 14.980 jiwa dengan 2100 Kepala Keluarga (KK).

Pada tahun 2004 ini, rencananya Kelurahan Kandang akan dipecah menjadi 3 (tiga) kelurahan karena dianggap terlalu luas dan jumlah penduduknya terlalu banyak sehingga pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat dianggap kurang efektif lagi. Keadaan geografis Kelurahan Kandang merupakan dataran seluruhnya, tidak terdapat daerah perbukitan / pegunungan dengan tinggi dari permukaan laut 3 meter, dan curah hujan rata-rata per tahunnya 2000 mm serta suhu rata-rata 33 0 C.

Sedangkan keadaan lahan kritis dan lahan terlantar di Kelurahan Kandang dibandingkan dengan luas wilayah secara keseluruhan termasuk kecil, yang paling banyak terdapat di sana adalah daerah lahan gambut dan daerah rawa-rawa / tambak, sehingga banyak masyarakat disana selain berprofesi sebagai nelayan juga mempunyai tambak, baik tambak udang maupun tambak kepiting rajungan.

Masyarakat Kelurahan Kandang terdiri dari berbagai macam suku, antara lain: Suku Serawai, Suku Batak, Suku Bugis, dan WNI Keturunan. Komposisi ketiga suku pertama hampir sama banyak, sedang WNI keturunan hanya beberapa orang tetapi mereka yang sangat dominan sebagai juragan atau pemilik kapal-kapal besar. Kelurahan Kandang dapat dikatakan sebagai Kelurahan Nelayan Modern terbesar di Propinsi Bengkulu, karena hampir rata-rata nelayan di kelurahan tersebut mempunyai kapal yang dilengkapi dengan motor mulai yang berkekuatan 90 PK hingga yang dibawah 10 PK. Dengan jumlah penduduk sebanyak 14. 980 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2.100, Kelurahan Kandang memang sudah se-

layaknya dipecah menjadi beberapa kelurahan, agar pelayanan birokrasi pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Keadaan Sosial Masyarakat Nelayan Kelurahan Kandang

Kehidupan sosial sebagian besar masyarakat Kelurahan Kandang adalah nelayan. Jika dilihat dari jenis usaha yang dijalankan dan penggunaan peralatan tangkap yang digunakan, maka kehidupan nelayan di Kelurahan Kandang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Nelayan Pukat Cincin, yaitu nelayan yang menggunakan kapal dengan kekuatan mesin 90 GT dan menggunakan jaring yang disebut jaring pukat cincin. Jaring ini panjangnya mencapai 400 meter dan lebar 100 meter, dengan wilayah penangkapan diatas 30 mil dari pantai. Disebut pukat cincin, karena jaring ini beroperasi di permukaan laut yang mempunyai kedalaman 100 – 200 meter, dimana jaring ini hanya berada dipermukaannya saja.

Nelayan Purse Seine (Sleret), yaitu jaring yang mempunyai ukuran 400x40 m yang cara kerjanya hampir sama dengan jaring pukat cincin tetapi ukurannya agak lebih kecil dan mesin kapal yang membawanya juga berukuran antara 10-20 GT.

Nelayan Cantrang (Mini Trawl), yaitu nelayan yang menggunakan jaring seperti jaring pukat harimau (trawl) tetapi ukurannya lebih kecil dan tidak dilengkapi dengan papan dan besi pemberat. Ini merupakan modifikasi dari jaring pukat harimau (trawl). Jalur penangkapan jaring cantrang sekitar 10 mil dari pantai dan waktu penangkapan berkisar antara 3-5 hari. Kapal yang digunakan hampir sama dengan kapal purse seine yang berkekuatan diatas 10 GT.

Nelayan Bubu dan Pancing, yaitu nelayan yang menggunakan jaring bubu dan pancing sebagai alat tangkap ikan. Kelompok nelayan ini dapat dikategorikan sebagai nelayan tradisional walaupun mereka dalam menangkap ikan telah menggunakan kapal bermotor. Kekuatan

kapal motor mereka dibawah 6 GT dan jaring bubu yang mereka gunakan berukuran kecil, 2x3 m dengan tinggi 1 m. Lamanya waktu penangkapan mereka berkisar antara 4-7 hari.

Nelayan Trawl (pukat harimau), yaitu mereka yang menggunakan jaring pukat harimau yang penggunaannya telah dilarang oleh pemerintah secara nasional. Tujuan utama mereka adalah menangkap udang kelong yang habitatnya pada 10-15 mil laut dan kedalaman 30 meter.

Nelayan Bagan, yaitu nelayan yang menggunakan alat tangkap berukuran 20x20 m, dengan sasaran tangkapan ikan teri, selain itu mereka juga menggunakan alat tangkap pancing selama berada di atas kapal. Jumlah nelayan ini hanya sedikit, kebanyakan nelayan bagan merangkap sebagai nelayan bubu.

Gambaran Sektor Perikanan di Kota Bengkulu

Menurut laporan Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu (1999) panjang pantai Bengkulu lebih kurang 500 km, Bengkulu merupakan Provinsi yang memiliki pantai terpanjang di Pulau Sumatera dan diperkirakan memiliki potensi perikanan laut sebanyak 126.217 ton per tahun. Namun sampai dengan tahun 1988, pemanfaatannya baru mencapai 21.421 ton per tahun atau 16,97 %. Jika dibandingkan dengan potensi sumber daya perikanan secara nasional dapat dilihat dari hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan (SDI) pada tahun 1997, yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 995/Kpts/IK.21/99 Tentang Potensi Sumberdaya Ikan dan Jumlah Tangkap Yang Diperbolehkan (JTB), potensi sumberdaya ikan di Perairan Indonesia adalah sebesar 6,258 juta ton pertahun, dengan rincian 4,400 jutan ton pertahun berasal dari perairan teritorial dan perairan wilayah serta 1,858 juta ton pertahun berasal dari perairan ZEEI. Namun demikian, karena manajemen perikanan menganut asas kehati-hatian (*precautionary approach*), maka JTB

(Jumlah Tangkap yang Diboolehkan) ditetapkan sebesar 80 % dari potensi tersebut atau sebesar 5,006 juta ton pertahun, dengan rincian 3,519 juta ton pertahun berasal dari perairan teritorial dan perairan wilayah serta 1,487 juta ton pertahun dari perairan ZEEI. Ini menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan di Provinsi Bengkulu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi perikanan secara nasional.

Sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan di Provinsi Bengkulu masih relatif kecil, bersifat perorangan dan belum terorganisir. Jumlah armada perikanan tradisional sebanyak 1.723 unit. Sedangkan jumlah armada non tradisional/modern sebanyak 68 unit (BPS Provinsi Bengkulu, 1999).

Keterbatasan sarana penangkapan tersebut merupakan salah satu penyebab rendahnya produktivitas nelayan tradisional karena usahanya masih sangat tergantung dengan alam. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh nelayan dan pola pendapatannya tidak teratur (Dinas Perikanan Provinsi Bengkulu, 1999).

Terjadinya over fishing di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan telah mendorong nelayan yang biasa menangkap ikan di perairan tersebut melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing ground) lain yang masih potensial, misalnya dari laut Jawa ke Laut Flores dan Selat Malaka atau Laut Banda. Hal ini apabila tidak diantisipasi dapat menjadi faktor pendorong timbulnya konflik antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal.

Tingkat kesejahteraan nelayan di Kota Bengkulu relatif rendah bila dibandingkan dengan sektor pekerjaan di luar nelayan. Rata-rata jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I pada tahun 1997 di Kota Bengkulu 15 % dari jumlah penduduk. Apabila diperhatikan, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I terbesar (27 % dari jumlah penduduk) berada di Kecamatan Teluk Segara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan

tradisional. Kehidupan masyarakat nelayan tradisional yang selalu berada dibawah garis kemiskinan tersebut tidak terlepas dari kengganannya mereka untuk memodernisasi di bidang perikanan terutama mengenai alat tangkap ikan yang mereka gunakan. Selama bertahun-tahun mereka menggunakan alat tangkap tradisional seperti : pancing, bubu dan jaring. Begitu juga dengan perahu yang digunakan, kebanyakan masih dibawah 10 GT atau bahkan masih banyak yang menggunakan perahu tanpa motor alias dengan mendayung.

Lain halnya dengan nelayan modern, penggunaan alat tangkap trawl telah digunakan sejak tahun 1985 hingga sekarang. Selain itu mereka juga menggunakan alat tangkap pukot cincin, purse seine, cantrang, bagan dan dogol yang kesemuanya merupakan alat tangkap yang lebih baik dan lebih canggih dari alat tangkap tradisional.

Analisis Data

Analisis Data I

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang

Proposisi 1

Beroperasinya kapal-kapal trawl yang menggunakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah menyebabkan keresahan dari para nelayan tradisional karena hasil tangkapan ikan mereka menjadi jauh menurun setiap bulannya.

Proposisi 2

Kapal-kapal bermotor milik nelayan modern yang menggunakan alat tangkap yang lebih canggih dan maju beroperasi di wilayah perairan nelayan tradisional juga menyebabkan rasa kurang senang para nelayan tradisional karena dianggap telah mengambil kaplingannya dalam mencari ikan.

Proposisi 3

Penggunaan alat tangkap ikan oleh nelayan modern dianggap dapat merusak kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dalam laut oleh nelayan tradisional sehingga menyebabkan hasil tangkapan ikan mereka terus menurun setiap bulannya.

Proposisi 4

Kurang tegasnya peraturan di bidang perikanan dan kurang tanggapnya pemerintah daerah melalui aparat yang berwenang dalam menyikapi dan menanggapi setiap keluhan dan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh para nelayan tradisional terhadap keberadaan alat tangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah.

Analisis Data II

Bentuk penyelesaian konflik antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang.

Proposisi 5

Keinginan kelompok nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dan nelayan modern di Kelurahan Kandang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tenang dan aman tanpa rasa was-was kapalnya diserang kelompok lawan menjadi pendorong untuk menyelesaikan konflik antara kedua kelompok tersebut secara damai melalui musyawarah dan duduk bersama satu meja.

Proposisi 6

Ketegasan dari pihak Pemerintah Kota Bengkulu untuk melarang penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah dan memberi sanksi sesuai hukum yang berlaku bagi para nelayan modern yang ketahuan menggunakan alat tangkap tersebut.

Proposisi 7

Adanya pembagian wilayah penangkapan ikan bagi nelayan tradisional dan nelayan modern, sehingga masing-masing kelompok nelayan dilarang untuk mela-

kukan kegiatan penangkapan ikan di luar wilayahnya sendiri.

Proposisi 8

Melakukan kerjasama antara nelayan tradisional dengan nelayan modern baik berupa bantuan alat-alat penangkapan ikan maupun semacam kontribusi hasil panangkapan sehingga terjalin rasa persaudaraan dan saling memiliki antara kedua kelompok nelayan tersebut.

Analisis Data III

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Proposisi 9

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang selama ini hanya sebatas jika terjadi konflik yang berbentuk benturan fisik seperti penyerangan kapal dan rumah-rumah nelayan.

Proposisi 10

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik susulan pasca konflik, Pemerintah Kota secara intensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan baik nelayan tradisional maupun nelayan modern.

Proposisi 11

Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Polairud dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bengkulu serta Administrasi Pelabuhan Pulau Baai (Adpel) melakukan sweeping dan razia baik di laut maupun di tempat pembongkaran ikan para nelayan dalam rangka menertibkan alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya.

Pembahasan Umum

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Konflik Nelayan Tradisional di

Kelurahan Pasar Bengkulu dengan Nelayan Modern di Kelurahan Kandang

Semenjak dikeluarkannya Keppres NO 39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 1980 sebagai salah satu akibat dari Peristiwa Muncar di Banyuwangi pada tahun 1980, dimana terjadi peristiwa besar dari kasus yang sederhana, maka jaring trawl dilarang penggunaannya di seluruh Indonesia oleh pemerintah. Penggunaan jaring trawl oleh nelayan di Kota Bengkulu telah dilakukan sejak tahun 1980-an hingga tahun 1995. Seiring dengan penggunaan jaring trawl selama lebih kurang 15 tahun itu, banyak keluhan dari para nelayan tradisional yang dalam menangkap ikan hanya meng-andalkan alat tangkap tradisional seperti jaring, pancing dan bubu. Mereka me-nganggap jaring trawl sebagai penyebab utama berkurangnya ikan di laut. Hal inilah yang memicu timbulnya konflik antara kedua kelompok nelayan tersebut. Tetapi bagi pihak nelayan modern, mereka menggunakan jaring trawl di luar wilayah perairan nelayan tradisional sehingga penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan tradisional dikarenakan alat tangkap nelayan tradisional yang sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi sekarang.

Masih beroperasinya kapal-kapal trawl di Kota Bengkulu merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya konflik, karena kelompok nelayan tradisional keberatan dengan penggunaan jaring trawl.

Selain karena faktor penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah seperti penggunaan jaring trawl, konflik yang terjadi antara kedua kelompok nelayan di Kota Bengkulu juga disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu perebutan sumber daya perikanan yang memang terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Abas (2002:46), bahwa berdasarkan pandangan Weber mengatakan konflik diantara pihak-pihak dari kelompok kepentingan ekonomi yang berbeda dalam proses-proses pelayanan publik, bisa tercipta lebih

dikarenakan oleh perebutan sumberdaya ekonomi. Dengan kata lain konflik sosial terjadi karena persaingan antar kelompok dalam masyarakat untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi yang langka. Hal senada juga diungkapkan oleh Kusnadi (2002), bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat nelayan, terutama antara nelayan tradisional dengan nelayan modern selain disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai alat tangkap ikan, juga disebabkan oleh faktor lain : perebutan sumber daya perikanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 392/Kpts/IK.120/4/99 Tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan, ditetapkan dalam pasal 2 bahwa Wilayah Perikanan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu :

Jalur I

Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut;

Perairan pantai diluar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut.

Jalur II, meliputi perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut.

Jalur III, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian diatas, maka perairan laut Kota Bengkulu juga dibagi ke dalam 3 (tiga) jalur penangkapan ikan. Kadangkala nelayan yang seharusnya menangkap di jalur II malah melakukan kegiatan penangkapan ikan di jalur I. Hal tersebut pernah terjadi pada tahun 1999 yang lalu dimana kapal bermotor nelayan modern yang seharusnya menangkap ikan di jalur II malah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan nelayan tradisional. Akibatnya terjadilah perselisihan yang memicu konflik.

Faktor perbedaan teknologi penangkapan ikan merupakan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya konflik dalam

masyarakat nelayan ter-utama nelayan tradisional dengan nelayan modern yang telah menerapkan penggunaan teknologi tangkap yang lebih canggih dan modern. Mungkin ada benarnya jika dikatakan bahwa realitas masyarakat nelayan adalah masyarakat yang selalu kalah. Kekalahan yang pertama adalah ketidakmampuannya dalam mengatasi alam yang kadang tidak selalu bersahabat. Kekalahan yang kedua adalah dalam realitas sosial mengalami marginalisasi karena ketertinggalan teknologi dan permasalahan yang begitu kompleks. Hal ini diungkapkan oleh Panayatou (1982) yang dikutip oleh Syauta (1990).

Penggunaan motorisasi pada penangkapan ikan sekitar tahun 1978 dengan menggunakan trawl ternyata mendatangkan konflik yang cukup hebat antara nelayan tradisional dengan nelayan modern hingga saat ini. Di satu sisi peningkatan teknologi penangkapan ini memberikan hasil yang cukup besar, akan tetapi mengorbankan nelayan tradisional yang tidak mempunyai penghasilan akibat sumberdaya ikan yang dirusak oleh trawl. Dihapusnya trawl pada tahun 1980 dan digantikan oleh teknologi penangkapan yang lebih memperhatikan kelangsungan sumberdaya tidak berarti masalah penerapan teknologi telah selesai di masyarakat nelayan. Sebuah kecemburuan baru muncul ketika masyarakat nelayan semakin terdesak oleh wilayah penangkapan yang semakin sempit dan persaingan ditentukan oleh teknologi penangkapan. Kusnadi (1997).

Beberapa perbandingan dan pengujian yang dilakukan oleh para peneliti tentang penerapan teknologi penangkapan ikan memberikan hasil adanya penguasaan akses teknologi penangkapan yang cukup besar oleh suatu kelompok dalam masyarakat nelayan baik dalam bentuk kepemilikan, modal serta usaha dalam bidang tersebut. Pollnac (1998).

Apa yang disampaikan diatas, kenyataannya memang terjadi di kehidupan masyarakat nelayan tradisional. Di satu pihak, mereka ingin memiliki teknologi

perikanan yang lebih maju tetapi tidak mempunyai modal untuk memilikinya. Faktor lain yang tidak memungkinkan para nelayan tradisional untuk memiliki teknologi perikanan yang maju adalah pendidikan. Hampir sebagian besar para nelayan tradisional memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan adanya perbedaan teknologi perikanan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern dalam bersaing memperoleh sumberdaya ikan yang wilayah penangkapannya semakin membuat terdesak nelayan tradisional, maka hal tersebut sangat membuka peluang untuk terjadinya konflik akibat rasa kecemburuan sosial yang tinggi, rasa stress karena tangkapan yang setiap harinya menurun mengakibatkan nelayan tradisional sangat rentan untuk timbulnya konflik. Apalagi hal tersebut dipicu dengan adanya nelayan luar daerah yang menangkap ikan di wilayah perairan tersebut dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju dari nelayan lokal.

Selain faktor-faktor diatas, ada hal lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antara kedua kelompok nelayan tersebut. Faktor lain itu disebut juga sebagai faktor laten konflik, antara lain : indikasi keberadaan sumber daya ikan yang terbatas, kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi, belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan, perbedaan sosial ekonomi dan tidak berfungsinya sarana dan prasarana perikanan, seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Abas (2002) melihat dari kacamata teori konflik yang disampaikan oleh Weber bahwa konflik itu muncul sebagai bentuk dari kekecewaan (kecemburuan) oleh pihak tertentu karena ada kelompok dalam masyarakat yang merasa kurang beruntung dalam pelayanan di sektor ekonomi, sementara ada kelompok masyarakat lain yang mendapatkan pelayanan secara berlebihan dalam sektor ekonomi tersebut. Kondisi ini merupakan bentuk atau wujud dari diskriminasi dalam pelayanan publik atau ketidakadilan yang diperankan oleh

aparatus pemerintah sehingga menimbulkan rasa tidak puas oleh sekelompok orang. Ketidakpuasan itu kemudian terus menerus terjadi sehingga dalam waktu tertentu ketika ada momen yang tepat dengan mudah akan meledak menjadi pertikaian, baik itu dalam bentuk vertikal berupa perlawanan kepada negara atau simbol-simbol negara, maupun horizontal berupa pertikaian antara masyarakat yang diuntungkan dan tidak beruntung tadi. Sedangkan menurut kacamata Marx, bahwa konflik terjadi karena terdapat dua kelas dalam masyarakat yang saling berhadapan secara antagonis, yaitu kelas pemilik modal dan kelas pekerja (buruh). Antagonis ini terjadi karena arogansi pemilik modal dengan dukungan negara yang begitu kuat dan semena-mena dimana buruh dianggap sebagai pekerja kasar yang harus tunduk dan taat terhadap segala kebijakan dan aturan yang dikehendaki oleh mereka. Hal tersebut kemudian semakin mendorong derasnya ketimpangan sosial dalam masyarakat yang setiap saat sangat rawan bagi terjadinya benturan. Ketimpangan tersebut menimbulkan perbedaan sosial ekonomi yang sangat jauh antara pemilik modal dan pekerja.

Sedangkan menurut Ralp Dahrendorf, seperti yang dikutip oleh Ritzer (1980:31), bahwa distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai : persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*).

Kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi dari pemerintah terlihat dari pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan diberikan oleh Dinas

Perikanan Kota Bengkulu maupun Propinsi Bengkulu dirasakan oleh nelayan masih kurang (belum optimal), hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

Melalui musyawarah mufakat antara nelayan tradisional dengan nelayan modern duduk satu meja dan dibicarakan masalah yang terjadi selama ini dengan pihak pemerintah sebagai mediatornya.

Hal tersebut telah dilakukan oleh masing-masing kedua kelompok nelayan pada tanggal 15 Juni 2003, kelompok nelayan tradisional mewakili 8 (delapan) kelurahan yang ada di Kota Bengkulu dan diwadahi oleh Himpunan Keluarga Nelayan dan Pedagang Ikan (HKNPI) sedang kelompok nelayan modern diwakili oleh nelayan trawl yang memiliki kapal motor ditas 30 GT. Dalam musyawarah tersebut tidak dihadiri oleh pihak dinas perikanan baik kota maupun provinsi. Hasil yang dicapai oleh musyawarah itu menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain : (1) Pengoperasian jaring trawl dilarang untuk dioperasikan di wilayah perairan Kota Bengkulu sepanjang 6 mil laut ke arah laut (2) Pihak nelayan tradisional meminta adanya kontribusi dari pihak nelayan modern/rawl sebagai hubungan patron-klient berupa penyisihan penghasilan sebanyak 5 (lima) % yang pemanfaatannya akan digunakan untuk : 2 (dua) % diserahkan sebagai PAD kepada pemerintah kota, sebesar 1,5 (satu setengah) % untuk membantu nelayan dan 1,5 (satu setengah) % untuk membantu para pedagang kecil ikan (3) Apabila ada kapal trawl yang sampai merusak jaring nelayan modern, maka pemilik kapal harus mengganti kerugian yang telah diderita nelayan tradisional tersebut. Hal tersebut ternyata cukup efektif, terbukti selama kurun waktu 7 (bulan) tidak terjadi gejolak dalam kedua kelompok masyarakat nelayan tersebut.

Adanya pembagian jalur penangkapan ikan yang jelas antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No 607 Tahun 1975 jo No 392 Tahun 1999 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan telah berupaya agar konflik antar nelayan terutama konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern dapat dihindari. Kapal-kapal nelayan modern terutama kapal trawl seharusnya jangan melakukan penangkapan di jalur I yang merupakan wilayah perairan yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional, sehingga tidak membuat marah nelayan tradisional karena merasa wilayah penangkapan ikannya diambil.

Sikap tegas dari Pemerintah Kota terhadap segala macam pelanggaran yang terjadi.

Pemerintah Kota Bengkulu harus bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat nelayan termasuk pembinaan terhadap oknum aparatnya yang bertindak nakal. Jika memang terbukti adanya kapal milik nelayan yang menggunakan alat tangkap yang telah dilarang penggunaannya, pemerintah melalui aparat hukumnya seperti Polairud dan KP3 harus menindak dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga harus melakukan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap penggunaan alat tangkap yang dioperasikan oleh nelayan baik di laut maupun di darat, bukan hanya sekedar formalitas semata.

Kemitraan usaha antara nelayan tradisional dengan nelayan modern

Kemitraan usaha adalah salah satu solusi untuk menghindari konflik yang terjadi, yaitu antara nelayan skala besar dengan nelayan skala kecil. Dengan terjalinnya kemitraan maka masing-masing pihak saling tergantung dan saling memperoleh manfaat dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Kemitraan yang umum diterapkan pada usaha perikanan adalah

dalam bentuk Inti-Plasma, dimana perusahaan perikanan bertindak sebagai inti dan nelayan bertindak sebagai plasma.

Berdasarkan kesepakatan, perusahaan inti biasanya berkewajiban dalam penyediaan sarana produksi (kapal, alat tangkap, es, dll) dan menampung (membeli) hasil tangkapan nelayan plasma. Sedangkan kewajiban nelayan adalah menangkap ikan dan menjual hasilnya kepada perusahaan inti, dengan harga yang disepakati bersama.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam Menyelesaikan Konflik yang Terjadi

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang, langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bengkulu yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Masih bersifat insidental, dalam artian bahwa Pemerintah Kota maupun Provinsi turun tangan setelah terjadinya konflik berupa bentrok fisik antara kedua kelompok nelayan yang bertikai. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh pemerintah pasca konflik adalah mencegah agar konflik yang terjadi tidak berkembang dan meluas dengan cara :

Mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari kelompok nelayan tradisional dan kelompok nelayan modern yang difasilitator langsung baik oleh Walikota Bengkulu maupun oleh Gubernur Bengkulu, mengenai akar permasalahan terjadinya konflik dan bagaimana kehendak kedua kelompok nelayan agar konflik tersebut dapat dihentikan dan tidak berlanjut.

Membentuk tim yang beranggotakan unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu, Polairud Polda Bengkulu, Lanal Bengkulu, yang bertugas untuk mengadakan razia mengenai penggunaan alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan. Kegiatan

razia dan pengawasan tersebut dilakukan di laut maupun didarat.

Dalam setiap memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI) maupun Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan (SIKPPI) kepada nelayan kapal motor, dilakukan pengawasan secara ketat baik daerah pengoperasian kapal maupun alat tangkap yang digunakan.

Menindak dengan tegas kapal-kapal nelayan yang terbukti secara nyata melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah dan alat tangkap yang dapat merusak kelestarian lingkungan laut beserta isinya, seperti jaring trawl, bahan peledak, bahan racun dan sebagainya.

Membuat kebijaksanaan yang dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan nelayan tradisional melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), IDT, Takesra, Kukesra, PMTAS, UPPKS dan sebagainya. Tetapi semua kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut belum menampakkan hasil yang memuaskan, kehidupan masyarakat nelayan tradisional tidak berubah malah sebagian besar bantuan yang merupakan pinjaman secara bergilir tersebut semuanya macet dan tidak berkembang.

Memberikan bantuan kapal motor kepada kelompok nelayan tradisional sebanyak 5 (lima) unit yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap kapal-kapal nelayan modern dan kapal-kapal nelayan luar dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, keberadaan kapal-kapal motor tersebut sudah tidak layak pakai lagi bahkan ada beberapa yang sudah tidak dapat digunakan lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional di Kelurahan Pasar Bengkulu

dengan nelayan modern di Kelurahan Kandang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

Masih beroperasinya kapal-kapal trawl milik nelayan modern walaupun penggunaan alat tangkap tersebut telah dilarang oleh pemerintah. Keberatan nelayan tradisional akan penggunaan alat tangkap trawl tersebut, antara lain : (1) merusak kelestarian sumberdaya perikanan (2) merusak habitat dan daerah pemijahan udang (3) merusak jaring-jaring nelayan tradisional yang dipasang di pinggir pantai, karena pengoperasian trawl sepanjang bibir pantai (4) hasil tangkapan sampingan berupa ikan-ikan yang memiliki nilai niaga yang rendah lebih banyak dari hasil tangkapan utama, yaitu udang kelong.

Pelanggaran jalur penangkapan oleh nelayan-nelayan modern, khususnya kapal-kapal trawl ke wilayah perairan nelayan tradisional. Hal tersebut berkaitan dengan perebutan sumber daya perikanan yang memang sangat terbatas.

Perbedaan teknologi penangkapan.

Nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap ikan tradisional, seperti : pancing, jaring putih, jaring pukut pantai dan lain-lain merasa jengkel dan frustrasi terhadap kapal-kapal nelayan modern yang menggunakan alat tangkap yang lebih maju dan modern sehingga hasil tangkapannya pun lebih banyak dan bernilai ekonomis tinggi, sementara nelayan tradisional hasil tangkapannya semakin hari cenderung semakin menurun. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan sosial yang tinggi sehingga sangat rentan untuk terjadinya konflik.

Kurang optimalnya fungsi dan peran kelembagaan atau institusi pemerintah.

Hal ini terlihat dari fungsi dinas perikanan dan kelautan sebagai institusi yang bertanggungjawab secara langsung terhadap masyarakat nelayan, kurang peka terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat nelayan tradisional berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang dilarang, pelanggaran jalur penangkapan oleh nelayan modern hingga kepada

pembinaan kepada para nelayan yang terkesan masih bersifat formalitas semata dan setengah-setengah.

Belum tegasnya pelaksanaan hukum dan peraturan perikanan.

Berdasarkan Keppres No 39 tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl, maka pengoperasian jaring trawl di seluruh Indonesia dinyatakan dilarang. Tetapi, di Kota Bengkulu masih banyak kapal-kapal nelayan modern yang menggunakannya, ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum oleh aparat yang berwenang belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini berkaitan juga dengan adanya kolusi antara pemilik kapal trawl dengan aparat di lapangan yaitu kepolisian. Dalam hal ini polairud dan angkatan laut yang membecking setiap kegiatan kapal trawl.

Bentuk penyelesaian konflik antara kedua kelompok nelayan tersebut ditempuh dengan cara :

Kapal-kapal trawl dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan nelayan tradisional (0-3 mil laut), jika memang tetap beroperasi, nelayan tradisional menghendaki adanya kontribusi kepada para nelayan tradisional berupa 5 % dari hasil tangkapan nelayan modern.

Penetapan jalur penangkapan yang jelas bagi nelayan tradisional dan bagi nelayan modern, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran jalur penangkapan;

Sikap tegas dari Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu terhadap segala macam pelanggaran yang terjadi.

Kemitraan usaha antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Hal ini pernah dilakukan pada tahun 1999 pasca konflik, dengan cara nelayan tradisional ikut dilibatkan dalam pengoperasian jaring trawl yang hasil tangkapan tersebut dikelola oleh koperasi nelayan tradisional. Selama lebih kurang 2 tahun tidak terjadi konflik antara kedua kelompok nelayan tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara lain :

Masih bersifat insidental, dimana pemerintah baru turun tangan jika konflik yang terjadi telah berbentuk benturan fisik seperti : penyerangan kapal-kapal di tengah laut, penyerangan rumah nelayan dan sebagainya, sedang upaya pra konflik terjadi dalam rangka mengantisipasinya belum ada yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasca konflik terjadi, pemerintah melakukan pengawasan terhadap kegiatan para nelayan terutama nelayan modern, melalui tim yang dibentuk oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propvinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Polresta dan AL agar tidak ada lagi yang mengoperasikan alat tangkap yang telah dilarang penggunaannya.

Memanggil para perwakilan nelayan tradisional dan perwakilan nelayan modern untuk berdamai dan bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama ini.

Bantuan kapal motor kepada kelompok nelayan tradisional untuk digunakan sebagai tindakan pengawasan terhadap kegiatan nelayan modern dalam melakukan penangkapan ikan.

Saran-saran

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran atau masukan yang bisa disampaikan antara lain :

Ada dua alternatif sebagai strategi dalam penyelesaian konflik penggunaan alat tangkap trawl : (1) memberikan ijin pengoperasian alat tangkap trawl secara terbatas; (2) melarang secara tegas pengoperasian alat tangkap trawl. Jika alternatif pertama yang diambil maka langkah yang harus ditempuh : (a) melarang sementara penambahan alat tangkap trawl (b) pengkajian stock assesment sumberdaya ikan (c) penetapan daerah operasi dari masing-masing armada trawl yang telah mendapatkan ijin (d) penetapan waktu pengoperasian trawl (sebaiknya ditetapkan pada siang hari) untuk memudahkan pengawasan (e) penetapan mata jaring trawl

secara tegas setiap penambahan armada kapal trawl yang disertai dengan : penguatan fasilitas pengawasan; pemberdayaan petugas penyidik di lapangan dan sosialisasi ketentuan yang telah ditetapkan. Jika mengambil alternatif kedua yaitu melarang pengoperasian trawl, maka langkah yang ditempuh antara lain : (a) melarang secara tegas penambahan armada dan alat tangkap trawl dengan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penghapusan Trawl sebagai tindak lanjut dari Keppres No 39 tahun 1980 dan jika terbukti masih ada nelayan yang mengoperasikannya harus ditindak dengan tegas (b) penghapusan/penghancuran terhadap seluruh alat tangkap trawl (c) pengenalan alat tangkap alternatif skala kelompok nelayan dengan catatan ada perubahan konstruksi alat tangkap yang lama.

Perlu koordinasi lintas sektoral untuk mengatur tentang penggunaan alat tangkap (metode dan jenis), pengaturan jalur-jalur penangkapan, perijinan kapal-kapal perikanan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu sebagai implementasi dari kebijakan nasional dan regional.

Pemberdayaan nelayan melalui kegiatan yang benar-benar tepat sasaran sehingga kegiatan pemberdayaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum optimal hasilnya dapat benar-benar bermanfaat dan membantu masyarakat nelayan tradisional. Untuk itu, sejak dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, kegiatan pemberdayaan nelayan dilakukan secara lebih intensif terutama melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), dimana tujuan program tersebut antara lain : (1) mereduksi pengaruh kenaikan BBM terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan dan penciptaan usaha produktif secara berkesinambungan (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat (3) memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat dalam men-

dukung pembangunan daerah (4) memicu bergeraknya usaha ekonomi produktif masyarakat di desa pesisir (5) mendorong bergeraknya mekanisme manajemen pembangunan masyarakat yang partisipatif dan transparan (6) memberikan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat pesisir yang terkait dengan sumberdaya laut dan pesisir.

Perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap tokoh masyarakat, ulama dalam hal manajemen konflik, sehingga dapat tercapai kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan konflik internal masyarakat.

Adanya kemitraan usaha antara nelayan tradisional dengan nelayan modern, sehingga masing-masing pihak saling tergantung dan saling memperoleh manfaat dari kegiatan usaha yang dilaksanakan. Pemerintah dalam hal ini menjadi sebagai mediator dalam mengatur kemitraan usaha antara kedua kelompok nelayan tersebut.

Pemerintah perlu mengembangkan usaha alternatif bagi nelayan tradisional, misalnya dibidang budidaya ikan, pengolahan ikan, perbengkelan dan lain sebagainya. Dengan adanya usaha alternatif diharapkan nelayan akan memperoleh penghasilan tambahan, sehingga ketergantungan terhadap hasil tangkapan ikan dapat dikurangi dan keinginan nelayan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya juga dapat ditekan. Disamping itu, upaya ini dapat juga mengurangi jumlah nelayan karena beralih profesi ke usaha alternatif yang lebih prospektif. Berkurangnya jumlah nelayan di daerah-daerah yang padat, juga merupakan solusi untuk menghindari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., 2002. Konflik Sosial : Ancaman Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah, dalam jurnal PSPK, Konflik Dalam Masa Transisi, PSPK, Jakarta.
- Abdul Wahab, S. 1988. Ekonomi Politik dan Bisnis Indonesia Era Orde Baru. Universitas Brawijaya, Malang.
- Amstutz, M R. 1988. An Introduction to Political Science. The Management of Conflict. Scott, Foreman and Company, Glenview, Illinois.
- Ary Wahyono. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 1999. Pembangunan Masyarakat Madani, Tinjauan Birokratik Politik. Jurnal Kebijakan Administrasi Publik Vol-3 tahun 1999. Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, A. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Hamner, W. C and Dennis W. M. 1978. Conflict and Defence, Business Publication Inc, Dallas.
- Hendricks, W. 2001. Bagaimana Mengelola Konflik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ida, L. 2002. Kekacauan Implementasi Otonomi Daerah : Perebutan Kuasa Politik dan Materi, dalam jurnal PSPK, Konflik Dalam Masa Transisi, PSPK, Jakarta.
- Islamy, I. 1998. Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Kebijakan Publik, FIA Universitas Brawijaya, Malang.
- Kartasasmita, G. 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya, LP3ES, Jakarta.
- Korten, D. C dan Sjahrir. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Indonesia, Jakarta.
- Koswara, E. 2000. Pengaruh Format Politik Nasional Terhadap Demokrasi Lokal, dalam Juliantara, Dadang. 2000. Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa. LAPERA, Pustaka Utama, Yogyakarta.

- Kusnadi. 1997. Kemiskinan Nelayan dan Pembangunan Desa Pantai. Pusat Studi Komunikasi Pantai Jember-Jatim, Seri Kertas Kerja Nomor 3 Yogyakarta.
- Kusnadi. HMA dan Bambang W. 2001. Teori dan Manajemen Konflik (Tradisional, Kontemporer dan Islam), Universitas Brawijaya Malang.
- Lofland, J & Lyn H. L. 1984. *Analyzing Social Setting : A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont, Cal. Wadsworth Publishing Company.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mubyarto. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Murdjito, F.X. 1998. Keragaan dan Kebijaksanaan Pembangunan Perikanan Pelita VI dan Tinjauan Menghadapi Era Globalisasi, dalam *Prosiding Simposium Perikanan Indonesia II*, Ujung Pandang, 2-3 Desember 1997.
- Nadjib, M. 1998. Adaptasi Ekonomi Masyarakat Nelayan dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Nomor 2/1998, PEP-LIPI, Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H. 2002 *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R)*, Jakarta.
- Pelly, Usman. 1993. Pengukuran Intensitas Potensi Konflik dalam Masyarakat Majemuk (*Jurnal Analisis CSIS Tahun XXII No. 3 Mei-Juni*). Centre For Strategic And International Studies.
- Pollnac, Richard. B. 1988. Karakter Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil. Dalam *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan*. Editor Michael M. Cernea. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pranarka, A. M. W dan Prijono, O S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Sajogyo dan Sarman, M. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, Puspa Swara, Jakarta.
- Satria, Arif. 2002. *Acuan Singkat Menuju Desentralisasi Pengelolaan Sumber daya Perikanan. Pusat Kajian Agraria IPB-Partnership for Governance Reform in Indonesia*, Jakarta.
- Setyohadi, Tuk. 1998. *Pemberdayaan Nelayan dan Petani Ikan dalam Kerangka Konsepsi Benua Maritim Indonesia dalam, Prosiding Simposium Perikanan Indonesia II*, Ujung Pandang, 2-3 Desember 1997.
- Soemardjan, S. 1992. *Otonomi Desa Apakah Itu?*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Nomor 2/1992. PT. Gramedia, Jakarta.
- Suparlan, P. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora Utama Press, Bandung.
- Susetiawan. 2001. *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suyanto, B. 1995. *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Syauta, Jacob. B. 1990. *Perikanan Tradisional di Maluku dan Peranan Kredit di Dalam Pengembangannya*. Tesis S-2 Program Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta.